



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENATAAN KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Penataan Kota, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penataan Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENATAAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Penataan Kota adalah Dinas Penataan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Penataan Kota digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Penataan Kota.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Penataan Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Penataan Kota;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Penataan Kota.

- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penataan Kota sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Penataan Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penataan Kota setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Penataan Kota secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Penataan Kotadilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62066

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 88 TAHUN 2016
Tanggal 13 April 2016

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENATAAN KOTA

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Kepala Dinas	1						
2.	Sekretaris Dinas		1					
	a. Kepala Subbagian Umum			1				
	1) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	2) Penyimpan Barang				1			
	3) Pengadministrasi Umum				3			
	4) Pengadministrasi Pimpinan				2			
	5) Penyiap Berkas				1			
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian			1				
	1) Pengelola Kepegawaian				2			
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2			
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1				
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				2			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran				2			
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1				
	1) Bendaharawan				1			
	2) Verifikator				1			
	3) Pengolah Data Keuangan				2			
	4) Pengadministrasi Keuangan				1			
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pola Ruang		1					
	a. Kepala Seksi Data Dasar Perencanaan			1				
	1) Pengelola Data Dasar Perencanaan				6			
	2) Pengolah Ukur Data Dasar Perencanaan				8			
	3) Pengadministrasi Data Dasar Perencanaan				2			
	b. Kepala Seksi Perencanaan Pola Ruang			1				
	1) Pengelola Perencanaan Pola Ruang				5			
	2) Pengadministrasi Perencanaan Pola Ruang				2			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PEGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	c. Kepala Seksi Evaluasi Pola Ruang			1				
	1) Pengelola Evaluasi Pola Ruang				5			
	2) Pengadministrasi Evaluasi Pola Ruang				1			
4.	Kepala Bidang Perencanaan Struktur Ruang		1					
	a. Kepala Seksi Perencanaan Transportasi dan Bina Marga			1				
	1) Pengelola Perencanaan Transportasi dan Bina Marga				5			
	2) Pengadministrasi Perencanaan Transportasi dan Bina				1			
	b. Kepala Seksi Perencanaan Tata Air dan Utilitas			1				
	1) Pengelola Perencanaan Tata Air dan Utilitas				4			
	2) Pengadministrasi Perencanaan Tata Air dan Utilitas				1			
	c. Kepala Seksi Perencanaan Sarana Kota, Tata Hijau dan Mitigasi Bencana			1				
	1) Pengelola Perencanaan Sarana Kota, Tata Hijau dan Mitigasi Bencana				4			
	2) Pengadministrasi Perencanaan Sarana Kota, Tata Hijau dan Mitigasi Bencana				1			
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1					
	a. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang			1				
	1) Pengelola Pemanfaatan Ruang				5			
	2) Pengadministrasi Pemanfaatan Ruang				1			
	b. Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Penataan Kota			1				
	1) Pengelola Sistem Informasi Penataan Kota				6			
	2) Pengadministrasi Sistem Informasi Penataan Kota				1			
	c. Kepala Seksi Peran Masyarakat dan Penataan Penomoran Bangunan			1				
	1) Pengelola Peran Masyarakat dan Penataan Penomoran Bangunan				5			
	2) Pengadministrasi Peran Masyarakat dan Penataan Penomoran Bangunan				2			
6	Kepala Bidang Penelitian Teknis Bangunan		1					
	a. Kepala Seksi Penelitian Teknis Arsitektur			1				
	1) Pengkaji Teknis Arsitektur				4			
	2) Pengadministrasi Penelitian Teknis Arsitektur				1			
	b. Kepala Seksi Penelitian Teknis Struktur			1				
	1) Pengkaji Teknis Struktur				4			
	2) Pengadministrasi Penelitian Teknis Struktur				1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Seksi Penelitian Teknis Mekanikal dan Elektrikal			1			
	1) Pengkaji Teknis Mekanikal dan Elektrikal				4		
	2) Pengadministrasi Penelitian Teknis Mekanikal dan Elektrikal				1		
7.	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan		1				
	a. Kepala Seksi Pengawasan Perencanaan Bangunan			1			
	1) Pengelola Pengawasan Perencanaan Bangunan				5		
	2) Pengolah Data Pengawasan Perencanaan Bangunan				1		
	3) Pengadministrasi Pengawasan Perencanaan Bangunan				1		
	b. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Bangunan			1			
	1) Pengelola Pengawasan Pelaksanaan Bangunan				15		
	2) Pengolah Data Pengawasan Pelaksanaan Bangunan				1		
	3) Pengadministrasi Pengawasan Pelaksanaan Bangunan				2		
	c. Kepala Seksi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan			1			
	1) Pengelola Pengawasan Pemanfaatan Bangunan				12		
	2) Pengolah Data Pengawasan Pemanfaatan Bangunan				1		
	3) Pengadministrasi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan				1		
8.	Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan		1				
	a. Seksi Penertiban Ruang dan Bangunan			1			
	1) Pengelola Penertiban Ruang dan Bangunan				10		
	2) Pengadministrasi Penertiban Ruang dan Bangunan				2		
	b. Kepala Seksi Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Bangunan			1			
	1) Penyidik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Bangunan				6		
	2) Pengadministrasi Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Bangunan				1		
	c. Kepala Seksi Pengaduan dan Penanganan Hukum			1			
	1) Pengelola Pengaduan dan Penanganan Hukum				5		
	2) Pengadministrasi Pengaduan dan Penanganan Hukum				1		
9.	Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3) Verifikator				1			
	4) Pengadministrasi Umum				2			
	6) Penyiap Berkas				1			
	7) Caraka				1			
	b. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ruang			1				
	1) Pengkaji Perencanaan dan Evaluasi Ruang				5			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Evaluasi Ruang				2			
	c. Kepala Seksi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengkaji Teknis Ruang dan Bangunan				5			
	2) Pengadministrasi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan				1			
	d. Kepala Seksi Pengawasan Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengelola Pengawasan Ruang dan Bangunan				8			
	2) Pengadministrasi Pengawasan Ruang dan Bangunan				1			
	e. Kepala Seksi Penertiban Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengelola Penertiban Ruang dan Bangunan				8			
	2) Pengadministrasi Penertiban Ruang dan Bangunan				1			
	f. Kepala Seksi Dinas Penataan Kota Kecamatan (8 Kecamatan)			8				
	1) Pengawas Bangunan				24			
	2) Penghimpun Data Ruang dan Bangunan				15			
	3) Pengadministrasi Umum				8			
	4) Penyiap Berkas				4			
10.	Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendaharawan				1			
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	3) Verifikator				1			
	4) Pengadministrasi Umum				2			
	5) Penyiap Berkas				1			
	6) Caraka				1			
	b. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ruang			1				
	1) Pengkaji Perencanaan dan Evaluasi Ruang				5			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Evaluasi Ruang				2			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PECAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PECAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	c. Kepala Seksi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengkaji Teknis Ruang dan Bangunan				5			
	2) Pengadministrasi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan				1			
	d. Kepala Seksi Pengawasan Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengelola Pengawasan Ruang dan Bangunan				8			
	2) Pengadministrasi Pengawasan Ruang dan Bangunan				1			
	e. Kepala Seksi Penertiban Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengelola Penertiban Ruang dan Bangunan				8			
	2) Pengadministrasi Penertiban Ruang dan Bangunan				1			
	f. Kepala Seksi Dinas Penataan Kota Kecamatan (6 Kecamatan)			6				
	1) Pengawas Bangunan				19			
	2) Penghimpun Data Ruang dan Bangunan				8			
	3) Pengadministrasi Umum				6			
	4) Penyiap Berkas				1			
11.	Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendaharawan				1			
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	3) Verifikator				1			
	4) Pengadministrasi Umum				2			
	5) Penyiap Berkas				1			
	6) Caraka				1			
	b. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ruang			1				
	1) Pengkaji Perencanaan dan Evaluasi Ruang				5			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Evaluasi Ruang				2			
	c. Kepala Seksi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengkaji Teknis Ruang dan Bangunan				5			
	2) Pengadministrasi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan				1			
	d. Kepala Seksi Pengawasan Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengelola Pengawasan Ruang dan Bangunan				8			
	2) Pengadministrasi Pengawasan Ruang dan Bangunan				1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI							KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	e. Kepala Seksi Penerbitan Ruang dan Bangunan			1					
	1) Pengelola Penerbitan Ruang dan Bangunan				8				
	2) Pengadministrasi Penerbitan Ruang dan Bangunan				1				
	f. Kepala Seksi Dinas Penataan Kota Kecamatan (8 Kecamatan)			8					
	1) Pengawas Bangunan				31				
	2) Penghimpun Data ruang dan Bangunan				11				
	3) Pengadministrasi Umum				8				
	4) Penyiap Berkas				1				
12.	Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan		1						
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1					
	1) Bendaharawan				1				
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1				
	3) Verifikator				1				
	4) Pengadministrasi Umum				2				
	5) Penyiap Berkas				1				
	6) Caraka				1				
	b. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ruang			1					
	1) Pengkaji Perencanaan dan Evaluasi Ruang				5				
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Evaluasi Ruang				2				
	c. Kepala Seksi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan			1					
	1) Pengkaji Teknis Ruang dan Bangunan				5				
	2) Pengadministrasi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan				1				
	d. Kepala Seksi Pengawasan Ruang dan Bangunan			1					
	1) Pengelola Pengawasan Ruang dan Bangunan				8				
	2) Pengadministrasi Pengawasan Ruang dan Bangunan				1				
	e. Kepala Seksi Penerbitan Ruang dan Bangunan			1					
	1) Pengelola Penerbitan Ruang dan Bangunan				8				
	2) Pengadministrasi Penerbitan Ruang dan Bangunan				1				
	f. Kepala Seksi Dinas Penataan Kota Kecamatan (10 Kecamatan)			10					
	1) Pengawas Bangunan				35				
	2) Penghimpun Data ruang dan Bangunan				18				
	3) Pengadministrasi Umum				10				
	4) Penyiap Berkas				3				

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
13.	Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendaharawan				1			
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	3) Verifikator				1			
	4) Pengadministrasi Umum				2			
	5) Penyiap Berkas				1			
	6) Caraka				1			
	b. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ruang			1				
	1) Pengkaji Perencanaan dan Evaluasi Ruang				5			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Evaluasi Ruang				2			
	c. Kepala Seksi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengkaji Teknis Ruang dan Bangunan				5			
	2) Pengadministrasi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan				1			
	d. Kepala Seksi Pengawasan Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengelola Pengawasan Ruang dan Bangunan				8			
	2) Pengadministrasi Pengawasan Ruang dan Bangunan				1			
	e. Kepala Seksi Penertiban Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengelola Penertiban Ruang dan Bangunan				8			
	2) Pengadministrasi Penertiban Ruang dan Bangunan				1			
	f. Kepala Seksi Dinas Penataan Kota Kecamatan (10 Kecamatan)			10				
	1) Pengawas Bangunan				32			
	2) Penghimpun Data Ruang dan Bangunan				26			
	3) Pengadministrasi Umum				10			
	4) Penyiap Berkas				1			
14.	Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendaharawan				1			
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	3) Verifikator				1			
	4) Pengadministrasi Umum				1			
	b. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ruang			1				
	1) Pengkaji Perencanaan dan Evaluasi Ruang				3			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Evaluasi Ruang				1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PEGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	c. Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengelola Pengawasan dan Penertiban Ruang dan Bangunan				4			
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Penertiban Ruang dan Bangunan				1			
	d. Kepala Seksi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan			1				
	1) Pengkaji Teknis Ruang dan Bangunan				2			
	2) Pengadministrasi Penelitian Teknis Ruang dan Bangunan				1			
	Jumlah	1	13	93	642	0		
	Jumlah Total	749						

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA